



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PATALAN
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PATALAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 82);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1633);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);

23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
25. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 33);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
28. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);

31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
33. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Urusan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32);
34. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
41. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
42. Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 72);
43. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
44. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
45. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 05);
46. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);

47. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
48. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);
49. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
50. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
51. Peraturan Bupati Bantul Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 77);
52. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
53. Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tentang Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kalurahan Bantul Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 180);
54. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 31);
55. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20);

56. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
57. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Barang/Jasa di Kalurahan Patalan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
58. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
59. Peraturan Bupati Bantul Nomor 102 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan *Cash Management System* Dalam Transaksi Non Tunai Pada Belanja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 102);
60. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);
61. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Patalan Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 7);
62. Peraturan Desa Patalan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 4);
63. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 9);
64. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 10);
65. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 11);

66. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 4 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Karya Pakarti (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 4);
67. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 2);
68. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Kalurahan Pada Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Pancen Agung Mulyo Dan Penambahan Penyertaan Modal Kalurahan Pada Badan Usaha Milik Kalurahan Karya Pakarti (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 7);
69. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2022 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PATALAN
dan
LURAH PATALAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN PATALAN
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	5.498.336.198,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	5.600.622.635,56
Surplus/(Defisit)	Rp	(102.286.437,56)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	157.286.437,56
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	55.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	102.286.437,56

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan tak bagian terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :

- a. APB Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal;
- c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulang bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Kalurahan tentang perubahan APB Kalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan;

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengesaran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Patalan.

Ditetapkan di Patalan
pada tanggal, 30 Desember 2022
LURAH PATALAN

ttd.

SAYUDI

Diundangkan di Patalan
pada tanggal, 30 Desember 2022
CARIK PATALAN,

ttd.

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO

LEMBARAN KALURAHAN PATALAN TAHUN 2022 NOMOR 9
NOREG. PERATURAN KALURAHAN PATALAN KAPANEWON JETIS,
KABUPATEN BANTUL : (9/PATALAN/2022)

Salinan Sesuai dengan aslinya,

An. Carik Patalan

Kepala Urusan Pangripta,



LAMPIRAN I
 PERATURAN KALURAHAN PATALAN
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
 PEMERINTAH KALURAHAN PATALAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Kalurahan	311.942.600,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	5.172.793.598,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.600.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	5.498.336.198,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	1.601.225.310,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.055.277.325,56	
5.3.	Belanja Modal	714.620.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	229.500.000,00	
	JUMLAH BELANJA	5.600.622.635,56	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(102.286.437,56)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	157.286.437,56	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	157.286.437,56	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Kalurahan	55.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	102.286.437,56	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARA	0,00	

Patalan, 30 Desember 2022
 LURAH

ttd.

SAYUDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN KALURAHAN PATALAN
 NOMOR 9 TAHUN 2022
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
 PEMERINTAH KALURAHAN PATALAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	311.942.600,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	5.172.793.598,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	13.600.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	5.498.336.198,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.528.421.635,56</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.931.166.790,56	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	56.800.560,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	56.800.560,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	866.534.680,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	866.534.680,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.200.800,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	17.200.800,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	260.157.480,56	ADD, DLL, PAD,
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	260.157.480,56	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	120.540.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	120.540.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.000.000,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	26.410.000,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.410.000,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.374.000,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.374.000,00	
	1.1.90	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Bamuska dan LKK	2.238.000,00	ADD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	2.238.000,00	
	1.1.91	Penyediaan Tunjangan Kinerja Bagi Lurah,Pamong Kalurahan ,Dan Bamuska	54.200.000,00	PAD
	1.1.91 5.1.	Belanja Pegawai	54.200.000,00	
	1.1.92	Penyediaan Tunjangan Hari Raya Bagi Lurah ,Pamong Kalurahan dan Bamuska	110.391.220,00	PBH
	1.1.92 5.1.	Belanja Pegawai	110.391.220,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.93		Penyediaan Tunjangan Purna Tugas Bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan B amuskal	71.690.000,00	PBH
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	71.690.000,00	
1.1.94		Penyediaan Tambahan Penghasilan Dari Tanah Pelungguh	4.927.650,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	4.927.650,00	
1.1.97		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Staf Kalurahan	182.822.400,00	ADD
1.1.97	5.1.	Belanja Pegawai	182.822.400,00	
1.1.98		Penyediaan Penghasilan bagi Staf Honoror	113.880.000,00	ADD
1.1.98	5.1.	Belanja Pegawai	113.880.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	37.335.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	14.435.000,00	PAD
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	395.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	14.040.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	22.900.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.900.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	84.094.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.200.000,00	PAD
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	46.910.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.910.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.519.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.519.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	30.165.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.165.000,00	
1.3.94		Penyusunan / Pendataan / Pemutakhiran Data Monografi Kalurahan	1.300.000,00	DDS
1.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.300.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	415.734.845,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	17.228.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.228.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	29.110.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.110.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	17.484.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.484.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	24.371.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.371.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	6.265.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.265.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuan gan)	13.250.000,00	DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masya rakat	7.220.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.220.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	122.100.000,00	DDS, PBH, SDD
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.750.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	42.350.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	102.500.500,00	ADD, PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.500.500,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lo mdes	8.900.000,00	DDS
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.900.000,00	
1.4.91		Penyusunan Rencana Induk Kalurahan / Detail Engenering Drawing (DED)	56.326.345,00	SDD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.326.345,00	
1.4.93		Penerbitan Lembaran Kalurahan / Berita Kalurahan	10.980.000,00	DDS
1.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.980.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	60.091.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	11.155.000,00	PAD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.155.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	29.426.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.426.000,00	
1.5.91		Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	19.510.000,00	PAD
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.510.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>2.097.674.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	312.307.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	126.313.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	113.813.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	45.285.000,00	BMP
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.285.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	94.415.000,00	BMP
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	94.415.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	12.026.500,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.526.500,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	5.500.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	34.268.000,00	DDS, PAD
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.268.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	539.806.500,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	99.314.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	99.314.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Ka der Kesehatan dll)	137.298.000,00	BMP, DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	137.298.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.395.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.395.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	264.425.000,00	BMP
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	264.425.000,00	
2.2.91		Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	15.049.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.049.000,00	
2.2.96		Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan (PSN,DII)	8.325.500,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.325.500,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	294.005.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	141.475.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	125.360.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	16.115.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	152.530.000,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	550.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	151.980.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	476.695.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	301.695.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	301.695.000,00	
2.4.93		Pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan Talut	175.000.000,00	PBP
2.4.93	5.3.	Belanja Modal	175.000.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	471.060.000,00	
2.5.90		Pengelolaan Rumah Pilah Sampang / Bank Sampah Milik Kalurahan	471.060.000,00	BMP
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	471.060.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	3.800.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	3.800.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.800.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>455.114.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	41.390.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	27.710.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.710.000,00	
3.1.92		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB)	13.680.000,00	DDS
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.680.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	84.467.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	8.769.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.769.000,00	PAD
3.2.02		Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec /Kab/Kot)	6.009.000,00	
3.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.009.000,00	PAD
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	7.560.000,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.560.000,00	DDS
3.2.90		Pembinaan Bidang Keagamaan	56.680.000,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	56.680.000,00	DDS, PAD
3.2.92		Fasilitasi Pelaksanakan MTQ/MHQ/PORSADIN	5.449.000,00	
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.449.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	275.147.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	8.500.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	DDS
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	238.927.000,00	
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	238.527.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	27.720.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.720.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	54.110.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.380.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.380.000,00	DDS
3.4.03		Pembinaan PKK	46.730.000,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.730.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>289.913.000,00</u>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	35.025.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	35.025.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.025.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	196.358.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	12.885.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.885.000,00	DDS
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	58.908.000,00	
4.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	300.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	58.608.000,00	
4.2.90		Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) dan Peternakan	78.460.000,00	DDS
4.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.460.000,00	
4.2.93		Pelatihan/Pengembangan Produksi/Pemasaran Bibit Unggul	13.595.000,00	DDS
4.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.595.000,00	DDS
4.2.95		Angkat Walet	32.510.000,00	
4.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.510.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	36.600.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	30.290.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.290.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	6.310.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.310.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	8.700.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	7.590.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.590.000,00	
4.4.90		Pendataan Penyandang Disabilitas	1.110.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.110.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.380.000,00	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	3.380.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.380.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	9.850.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	9.850.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.850.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK D</u>	<u>229.500.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.500.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.500.000,00	PAD
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.500.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	4.500.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	4.500.000,00	PAD
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.500.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	220.500.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	4.500.000,00	PAD
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.500.000,00	
5.3.01		Bantuan Langsung Tunai (BLT)	216.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	5.600.622.635,56	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(102.286.437,56)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	157.286.437,56	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	55.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	102.286.437,56	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARA	0,00	

Patalan, 30 Desember 2022

LURAH

ttd.

SAYUDI